

Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima)

Afifah Hadiyatullah, Bambang Kusbandrijo, Joko Widodo

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: afifahhadiyatullah@gmail.com

Article Information

Submitted: 15

December 2024

Accepted: 20

December 2025

Online Publish: 16

January 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima serta mengidentifikasi model implementasi yang optimal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, melibatkan 11 informan utama dan pendukung, termasuk pejabat pemerintah, kepala unit pengelolaan, serta tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kota Bima telah menerapkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, implementasinya belum optimal. Tantangan utama meliputi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung. Program seperti Bank Sampah dan TPS3R belum berjalan maksimal, dengan pengurangan sampah hanya mencapai 1% dari total volume harian 80,6 ton. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah serta keterbatasan fasilitas pengangkutan juga menghambat efektivitas kebijakan. Model implementasi kebijakan berdasarkan pendekatan David C. Korten menunjukkan pentingnya keselarasan antara kebijakan, pemanfaat, dan organisasi pelaksana. Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Strategi seperti edukasi intensif, sosialisasi melalui media sosial, serta penguatan infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Kata kunci: Analisis, Kebijakan, Pengelolaan Sampah

Abstract

This study aims to describe and analyze the implementation of waste management policies in Bima City and identify the optimal implementation model. The research employs a qualitative method conducted at the Bima City Environmental Agency, involving 11 primary and supporting informants, including government officials, unit heads, and community leaders. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, and analyzed using the Miles and Huberman model. The findings reveal that despite the enactment of Regional Regulation No. 3 of 2018 on Waste Management in Bima City, its implementation remains suboptimal. Key challenges include budget limitations, human resources, and supporting facilities. Programs such as Waste Banks and TPS3R (3Rs Temporary Waste Storage) have not been maximized, with waste reduction achieving only 1% of the total daily volume of 80.6 tons. Low public participation in waste sorting and limited transportation facilities further hinder the policy's effectiveness. The policy implementation model, based on David C. Korten's approach, underscores the importance of alignment among policies, beneficiaries, and implementing organizations. Achieving success requires collaboration among the government, community, and private sector. Strategies such as intensive education, socialization through social media, and infrastructure strengthening are crucial to enhancing policy effectiveness.

Keywords: Analysis, Policy, Waste Management

How to Cite

DOI

e-ISSN

Published by

Afifah Hadiyatullah, Bambang Bambang Kusbandrijo, Joko Widodo/Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima/Vol 5 No 6 (2025)

<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i6.552>

2721-2246

Rifa Institute

Pendahuluan

Permasalahan sampah yang terjadi saat ini menjadi masalah yang serius di banyak kota, termasuk pada Kota Bima. Peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi barang yang selalu meningkat menyebabkan volume sampah yang dihasilkan setiap tahunnya terus meningkat (Syafi'i, Rahardian, & Setijaningrum, 2020); (Fadlillah & Sofilda, 2024).

Jumlah penduduk yang ada di kota Bima ditahun 2023 berdasarkan data proyeksi BPS kota bima sebesar 161.362 Jiwa. Jumlah tersebut meningkat 2,47 % dibandingkan tahun lalu sebesar 157.362 jiwa, dengan penambahan jumlah penduduk pada saat ini sehingga membuat volume persampahan yang ada pada Kota Bima semakin meningkat dari tahun 2021-2023 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk, Timbulan Sampah, dan Pengelolaannya di Kota Bima Tahun 2021–2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah/Ton	Sampah Terangkut/Ton	Sampah Tidak Terkelola/Ton
1	2021	156.224	28.776,70	21.582,53	27.593,97
2	2022	157.362	29.348,30	22.011,23	28.162,62
3	2023	161.362	30.219,60	23.571,29	28.747,91
	Total		88.344,60	67.165,05	84.504,50

Sumber: SSumber: *Bidang PSLB3 DLH Kota Bima, 2023*

Sampah tersebut dominan sampah domestik atau yang dihasilkan rumah tangga. Sampah-sampah tersebut dihasilkan dari wilayah pasar dan pusat pertokoan atau perbelanjaan serta di lingkungan warga Kota Bima. Sampah-sampah yang dihasilkan tersebut dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Yaitu TPA yang berada di Kelurahan Oi Mbo Kecamatan Rasanae Timur. Daya tampung TPA yang ada sekarang seluas 8 Ha maka jika di lihat tampung yang tersedia belum memadai atau belum cukup hingga saat ini. Saat ini pemerintah Kota Bima sedang memproses penambahan lahan area TPA anggaran Tahun 2024. Pengangkutan hingga pembuangan sampah ke TPA menggunakan sistem pelayanan dari Kelurahan sampai di tingkat Kota. Sistem pelayanan tersebut yakni sampah dari wilayah Kelurahan akan diangkut menggunakan Kendaraan dump truck dan motor tiga roda. Setelah itu, akan dititipkan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang sudah ditentukan yang nantinya akan diangkut atau disisir petugas kebersihan tingkat Kota. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima memiliki layanan 24 unit dump truck, 5 buah amroll truck, 6 buah motor roda tiga, 37 kontainer, 2 mini loader, 1 wheel loader, 1 buah mobil sweeper, 1 buah mobil compactor dan 8 buah mobil pick up. Adapun sarana yang ada di TPA terdiri dari 1 Buah Bangunan kantor, Garasi, Sumur Resapan, 2 Kolam Lindi (Penampungan Air Limbah), Penampungan sampah (Sanitary Landfill) dan mobil eksafaktor 2 Unit.

Pengelolaan sampah yang ada pada Kota Bima pada saat ini belum maksimal dilakukan disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang mengangakibatkan terhambatnya pengelolaan sampah tersebut yaitu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dalam memilah sampah organik dan non organik sebelum dibuang, sehingga sampah yang ada masih bercampur yang akhirnya menjadi sampah *residu* (yang tidak ada nilai) yang di angkut ke TPA, hal tersebut membuat pengelolaan sampah yang terjadi pada saat ini belum sesuai prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) (Bui, Tseng, Tseng, & Lim, 2022); (Chanhampee, 2010); (Yin, Feng, Xin, & Yu, 2023). Tanpa penerapan metode pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, hal ini dapat berpotensi membahayakan kesehatan dan merusak ekosistem seperti pemukiman, hutan, lahan pertanian, sungai, hingga lautan (Eriksson, 2017); (Przygodzki Zbigniew, 2023); (Parikh, 2007); (Hayoun, 2021).

Berdasarkan Peraturan Darah nomor 3 Tahun 2018 pasal 9 berbunyi Pemilahan sampah

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf (a) dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya sedangkan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan non organik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus fasilitas umum dan fasilitas lainnya. Dalam Pasal 10 nomor 3 Tahun 2018 Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (b) dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampah ke TPA dengan tetap terjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Selain faktor di atas, faktor lain yang menghambatnya pengelolaan sampah di kota Bima yaitu banyaknya program dan Inovasi – Inovasi yang digagas oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup kota Bima yang tidak berjalan secara efektif. Salah satu program yang sudah digagas adalah bank sampah Sesuai dengan pasal 15 nomor 2 bahwa bank sampah induk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bank sampah yang berdiri sendiri dan memiliki dasar keputusan dari pejabat berwenang setempat, memiliki struktur organisasi pengelola, memiliki nasabah bank sampah binaan, serta menjalankan bank sampah induk, namun bank sampah ini sudah tidak berjalan kembali. Selain itu dengan adanya surat edaran kota Bima no. 018/74/II/DLH/2023 yang menjadikan ASN sebagai tukang pungut sampah dengan memilah dan memilih sampah organik dan non organik yang ada di rumah dan dibawa ke kantornya masing – masing, program inipun tidak berjalan lagi (tribun Lombok.com).

Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bima mencatat peningkatan volume sampah tiap tahunnya. Sistem pengelolaan saat ini masih berorientasi pada mekanisme Kumpul-Angkut-Buang, sehingga sangat bergantung pada jumlah armada kebersihan yang dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan jumlah armada kebersihan yang menangani masalah persampahan sangat terbatas. Dari segi biaya, sistem pengelolaan sampah saat ini membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga perlu dicarikan alternatif lain.

Dunn menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan aktivitas yang melibatkan aspek intelektual dan praktis dengan tujuan menciptakan dan menilai secara kritis serta mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses analisis kebijakan (Lv et al., 2021); (Mancinelli, Mazzanti, Nicolli, Biolcati, & Dem, 2012); (Syafi'i et al., 2020). Analisis kebijakan adalah proses yang menghasilkan informasi untuk membantu para pengambil keputusan dalam menilai pelaksanaan suatu kebijakan, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan alternatif perbaikan (Cotton, 2017); (Leschine, 1988); (Broitman, Ayalon, & Kan, 2012); (Rodić & Wilson, 2017). Proses ini bisa dilakukan secara formal dan terstruktur, biasanya melibatkan studi yang mendalam terkait isu-isu atau tantangan yang muncul dalam evaluasi program yang sudah berjalan (Runhaar, Dieperink, & Driessen, 2006); (Olatayo, Mativenga, & Marnewick, 2022); (Fadlillah & Sofilda, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, yang terletak di Jl. Damrontu, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fenomena implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang belum optimal, terutama dalam proses penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Bima. Penelitian melibatkan berbagai informan, termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, Sekretaris Dinas, Kepala Inspektorat, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, serta informan pendukung seperti Kepala UPT TPA, Direktur Bank Sampah, tokoh masyarakat, wartawan, akademisi, kepala cabang BUMN, dan anggota LSM, dengan total 11 orang. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber, dokumentasi berupa catatan atau dokumen terkait, serta observasi lapangan untuk mendapatkan data aktual yang

mendukung penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Kombinasi teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan, valid, dan memenuhi standar penelitian yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap kendala, peluang, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima

Kota Bima telah mengambil langkah penting dalam pengelolaan sampah melalui penerbitan Peraturan Daerah Kota Bima No. 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan ini bertujuan untuk menangani permasalahan sampah secara komprehensif dengan dua pendekatan utama, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Meskipun kerangka kerja telah ditetapkan, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung. Dalam upaya pengurangan sampah, pemerintah kota mengaktifkan kembali berbagai inisiatif seperti Bank Sampah Induk, TPS3R, dan unit bank sampah di tingkat kelurahan dan sekolah. Namun, pendekatan ini masih membutuhkan optimalisasi lebih lanjut agar sesuai dengan target nasional.

Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah menggerakkan Bank Sampah Induk dan TPS3R untuk meningkatkan efisiensi pengurangan sampah dari sumbernya. Namun, data menunjukkan bahwa program ini belum berjalan maksimal. Saat ini, hanya sebagian kecil wilayah di Kota Bima yang telah terlayani oleh sistem pengurangan sampah, sementara fokus utama masih pada penanganan sampah melalui metode kumpul, angkut, dan buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Volume sampah yang dihasilkan setiap hari mencapai sekitar 80,6 ton, namun pengurangan sampah baru mencapai sekitar 1% dari total produksi.

Penanganan sampah di Kota Bima dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Namun, proses pemilahan belum sepenuhnya diterapkan karena keterbatasan anggaran dan kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah organik dan non-organik di berbagai wilayah. Program pemilahan sampah sering kali bergantung pada sosialisasi kepada masyarakat, terutama di lingkungan sekolah. Edukasi mengenai pentingnya memilah sampah dari sumbernya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, meskipun tantangan seperti rendahnya nilai ekonomis sampah campuran masih menjadi hambatan utama.

Proses pengumpulan sampah di Kota Bima dilakukan oleh rumah tangga yang menunggu jadwal pengangkutan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Namun, masyarakat sering kali mencampur semua jenis sampah dalam satu wadah, yang mengurangi efektivitas pengelolaan di tahap selanjutnya. Jadwal pengangkutan sampah bervariasi di setiap wilayah, mulai dari satu hingga tiga kali per minggu, tergantung pada ketersediaan armada dan rute pengangkutan. Namun, keluhan terkait ketidaktepatan waktu pengambilan sampah sering muncul, yang menunjukkan perlunya penjadwalan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi.

Pengolahan sampah di TPA dilakukan melalui metode pemadatan, pengomposan, dan daur ulang. Akan tetapi, program pengolahan sampah ini belum berjalan maksimal karena keterbatasan lahan, sumber daya manusia, dan anggaran. Upaya untuk memperbaiki situasi ini termasuk pengajuan proposal kepada pemerintah pusat untuk pengadaan fasilitas pengolahan sampah yang lebih memadai. Namun, hingga kini, keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala utama, mengingat pengolahan sampah membutuhkan area sekitar lima hektar untuk bisa beroperasi secara optimal.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi kunci utama untuk

meningkatkan efektivitas program yang telah dirancang (Yang et al., 2023); (Ratnasari, et.al 2023). Namun, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan pengolahan sampah menunjukkan bahwa edukasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup saat ini sering kali terbatas pada undangan kepada perwakilan masyarakat, yang tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara langsung. Selain itu, keberadaan tempat sampah di area publik juga masih sangat kurang, yang menyebabkan sampah sering kali berserakan di tempat umum.

Dari hasil wawancara dan analisis lapangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan dukungan anggaran yang lebih besar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat dalam menjalankan pola hidup yang lebih ramah lingkungan (Kern, Rogge, & Howlett, 2019); (Kern et al., 2019).

Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima

Model implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima menggunakan pendekatan David C. Korten yang terdiri dari tiga unsur utama: kesesuaian antara program kebijakan dengan pemanfaatan, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan program (Hudson, Hunter, & Peckham, 2019); (Santosa, 2021); (Ariyanti, 2023). Dalam konteks ini, analisis implementasi kebijakan dilakukan melalui pendekatan holistik untuk memahami hubungan antara kebijakan, masyarakat, dan organisasi pelaksana.

1. Kesesuaian antara Program Kebijakan dengan Pemanfaatan

Pemanfaat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah masyarakat Kota Bima yang menginginkan hidup bersih dan sehat. Namun, masyarakat masih menghadapi banyak kendala yang menyebabkan kehidupan bersih dan sehat belum tercapai. Pengelolaan sampah di Kota Bima dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, tetapi implementasinya masih memiliki banyak kekurangan.

Meskipun masyarakat Kota Bima secara budaya dan sosial memiliki nilai-nilai yang mendukung kebersihan, kebijakan pengelolaan sampah dinilai belum menjadi solusi yang efektif. Paradigma kebijakan pengelolaan sampah masih bersifat konvensional, dengan pendekatan yang kurang inovatif. Kebijakan seperti larangan membuang sampah sembarangan sering kali hanya formalitas tanpa langkah konkret untuk implementasi.

Kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah menjadi salah satu hambatan utama. Misalnya, fasilitas tempat sampah yang terbatas di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi membuat masyarakat kesulitan mematuhi aturan. Selain itu, kebijakan ini juga belum diikuti dengan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Masyarakat menginginkan adanya sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Kurangnya informasi dan edukasi tentang jadwal pengangkutan sampah juga menjadi tantangan tersendiri. Kesadaran masyarakat dalam mendukung program kebersihan belum sepenuhnya terbangun, terutama terkait masalah sampah plastik yang menjadi persoalan signifikan.

Dengan kondisi seperti ini, output program pengelolaan sampah belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masih banyak sampah yang berserakan di jalan-jalan dan tempat umum di Kota Bima, yang menunjukkan bahwa tujuan hidup bersih dan sehat belum tercapai.

2. Kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana

Pengelolaan sampah di Kota Bima dilakukan berdasarkan asas tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini masih menemui banyak kendala, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh DLH. Hingga saat ini, masyarakat masih minim informasi terkait kebijakan pengelolaan sampah.

Beberapa hambatan lain yang dihadapi termasuk terbatasnya fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti kurangnya unit kebersihan di tingkat kelurahan. Padahal, unit kebersihan di tingkat lokal dapat memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat dan memperkuat pengelolaan sampah dari rumah tangga hingga tempat pembuangan akhir. Selain itu, minimnya keterlibatan komunitas lokal dalam kampanye kebersihan lingkungan juga menjadi kelemahan dalam implementasi kebijakan ini.

DLH dinilai perlu meningkatkan manajemen pengelolaan sampah dan memperkuat kolaborasi dengan komunitas lokal untuk mempromosikan kebersihan lingkungan. Penggunaan media sosial sebagai platform edukasi dan publikasi langkah-langkah penanganan sampah dapat menjadi solusi efektif, mengingat tingginya tingkat penggunaan media sosial di Kota Bima.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan lebih sering mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti kampanye kebersihan, jalan sehat, atau kegiatan olahraga bersama yang disertai dengan aktivitas bersih-bersih lingkungan. Kegiatan ini dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam isu pengelolaan sampah.

Namun, keterlibatan masyarakat yang masih minim juga dipengaruhi oleh lemahnya eksekusi kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah. Kurangnya edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui tokoh agama, menjadi tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kebijakan pengelolaan sampah juga menghadapi keterbatasan anggaran, yang berdampak pada terbatasnya fasilitas seperti tempat pengolahan sampah yang representatif. Sebagai contoh, sampah masih sering dibuang di jalan poros pegunungan Ncai Kapenta karena kurangnya tempat pengolahan sampah yang memadai.

Tantangan lain adalah kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di aliran sungai, yang dapat menyebabkan dampak negatif seperti banjir (Fernandes, 2023). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu meningkatkan edukasi tentang dampak buruk pembuangan sampah sembarangan dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan (Rogers, 2007); (Carter, 2016); .

3. Kesesuaian antara Organisasi Pelaksana dengan Program

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, DLH Kota Bima memiliki peran penting sebagai organisasi pelaksana. Namun, efektivitas DLH dalam melaksanakan kebijakan ini masih jauh dari harapan masyarakat. Salah satu kekurangan yang signifikan adalah belum maksimalnya edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya mendukung kebijakan pengelolaan sampah. Program-program yang melibatkan masyarakat, seperti bank sampah, masih belum berjalan optimal di Kota Bima.

Sebagai contoh, meskipun ada inisiatif untuk membangun bank sampah induk yang dikelola oleh pemerintah, progresnya masih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang telah dirancang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan juga masih rendah, yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program ini (Ferretti, Pluchinotta, & Tsoukiàs, 2019); (Dunlop, Ongaro, & Baker, 2020); (Schoenefeld & Jordan, 2019).

DLH juga perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, untuk mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas yang memadai, seperti tempat pengolahan sampah, sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membangun kerjasama dengan sektor swasta untuk mendukung program-program pengelolaan sampah. Misalnya, bank sampah dapat dijadikan mitra binaan oleh perusahaan untuk memberikan dukungan finansial dan teknis dalam pengelolaan sampah. Namun, keberhasilan program ini tetap bergantung pada kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dari sisi organisasi pelaksana, efektivitas DLH dalam melaksanakan tugas-tugas yang disyaratkan oleh program masih belum optimal. Jika organisasi pelaksana tidak mampu menyampaikan output program dengan tepat, maka tujuan program tidak akan tercapai (Bourgeois & Maltais, 2023); (Valle-Cruz, 2020). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi organisasi pelaksana untuk mengatasi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan sampah di Kota Bima masih belum optimal karena perencanaan dan pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Upaya pengurangan sampah, seperti pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali, belum dilakukan secara maksimal, sementara penanganan sampah masih terbatas pada pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir tanpa implementasi sistem pemilahan dan pengolahan yang efektif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Selain itu, kesesuaian antara kebijakan pengelolaan sampah dengan kebutuhan masyarakat, peran organisasi pelaksana, serta tingkat partisipasi masyarakat juga menunjukkan kendala signifikan. Kinerja program tidak mencapai harapan karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat, minimnya tanggung jawab baik dari masyarakat maupun Dinas Lingkungan Hidup, serta ketidaksiapan masyarakat dalam menerima kebijakan tersebut. Akibatnya, implementasi kebijakan pengurangan dan penanganan sampah belum terealisasi sepenuhnya, yang mencerminkan perlunya perbaikan koordinasi, partisipasi, dan komitmen semua pihak dalam pengelolaan sampah di Kota Bima.

BIBLIOGRAFI

- Ariyanti, Ketut Alit. (2023). Evaluasi Kebijakan Green Economy Di Banjar Kayumas Kelod Denpasar Bali. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2). <https://doi.org/10.47532/jic.v6i2.908>
- Bourgeois, Isabelle, & Maltais, Stéphanie. (2023). Translating Evaluation Policy Into Practice in Government Organizations. *American Journal of Evaluation*, 44(3), 353–373. <https://doi.org/10.1177/10982140221079837>
- Broitman, Dani, Ayalon, Ofira, & Kan, Iddo. (2012). One size fits all? An assessment tool for solid waste management at local and national levels. *Waste Management*, 32(10), 1979–1988. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.05.023>
- Bui, Tat Dat, Tseng, Jiun Wei, Tseng, Ming Lang, & Lim, Ming K. (2022). Opportunities and challenges for solid waste reuse and recycling in emerging economies: A hybrid analysis. *Resources, Conservation and Recycling*, 177. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105968>
- Carter. (2016). ORCA Online Research @ Cardiff. *Orca*, 1–2.
- Chanchampee, Poonsak. (2010). *Methods for Evaluation of Waste Management in Thailand in Consideration of Policy, Environmental Impact and Economics*. 286.
- Cotton, Matthew. (2017). Nuclear waste politics: An incrementalist perspective. In *Nuclear Waste Politics: An Incrementalist Perspective*. <https://doi.org/10.4324/9781315767963>
- Dunlop, Claire A., Ongaro, Edoardo, & Baker, Keith. (2020). Researching COVID-19: A research agenda for public policy and administration scholars. *Public Policy and Administration*, 35(4), 365–383. <https://doi.org/10.1177/0952076720939631>
- Eriksson, Ola. (2017). Energy and waste management. *Energies*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/en10071072>
- Fadlillah, Faqri, & Sofilda, Eleonora. (2024). Effectiveness of Implementation of Household Waste Management Policy in North Jakarta. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(2), 2879–2894.
- Fernandes, Reynaldo. (2023). Public policies and social progress: Two evaluation models. *Journal of Public Policy*, 43(2), 199–214. <https://doi.org/10.1017/S0143814X22000289>
- Ferretti, Valentina, Pluchinotta, Irene, & Tsoukiàs, Alexis. (2019). Studying the generation of alternatives in public policy making processes. *European Journal of Operational Research*, 273(1), 353–363. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.07.054>
- Hayoun, N. L. (2021). *Exploring the link between waste governance structures and livelihood options for urban waste pickers*. (August).
- Hudson, Bob, Hunter, David, & Peckham, Stephen. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Kern, Florian, Rogge, Karoline S., & Howlett, Michael. (2019). Policy mixes for sustainability transitions: New approaches and insights through bridging innovation and policy studies. *Research Policy*, 48(10), 103832. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.103832>
- Leschine, Thomas M. (1988). Ocean waste disposal management as a problem in decision-making. *Ocean and Shoreline Management*, 11(1), 5–29. [https://doi.org/10.1016/0951-8312\(88\)90003-3](https://doi.org/10.1016/0951-8312(88)90003-3)
- Lv, Hao, Li, Yashuai, Yan, Hong Bin, Wu, Di, Shi, Guanqun, & Xu, Qian. (2021). Examining construction waste management policies in mainland China for potential performance improvements. *Clean Technologies and Environmental Policy*, Vol. 23, hal. 445–462. <https://doi.org/10.1007/s10098-020-01984-y>
- Mancinelli, Susanna, Mazzanti, Massimiliano, Nicolli, Francesco, Biolcati, Dario, & Dem, Quaderni. (2012). *Quaderno DEM 5 / 2012 Management and Disposal Performances*.
- Olatayo, Kunle Ibukun, Mativenga, Paul T., & Marnewick, Annlizé L. (2022). Does Policy on

- Plastic Waste Support Higher Waste Management Hierarchy Options? *Recycling*, 7(3), 1–23. <https://doi.org/10.3390/recycling7030036>
- Parikh, J. (2007). *Gender and Climate Change. Framework for Analysis, Policy & Action*.
- Przygodzki Zbigniew, et. al. (2023). *Policy Framework and Market analysis*. (101037031).
- Ratnasari, Solichah, Mizuno, Kosuke, Herdiansyah, Herdis, & Simanjutak, Edward G. H. (2023). Enhancing Sustainability Development for Waste Management through National–Local Policy Dynamics. *Sustainability (Switzerland)*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/su15086560>
- Rodić, Ljiljana, & Wilson, David C. (2017). Resolving governance issues to achieve priority sustainable development goals related to solid waste management in developing countries. *Sustainability (Switzerland)*, 9(3). <https://doi.org/10.3390/su9030404>
- Rogers, Patricia J. (2007). *Theory-Based Evaluation: Reflections Ten Years On*. (114), 63–81. <https://doi.org/10.1002/ev>
- Runhaar, Hens, Dieperink, Carel, & Driessen, Peter. (2006). Policy analysis for sustainable development: The toolbox for the environmental social scientist. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 7(1), 34–56. <https://doi.org/10.1108/14676370610639236>
- Santosa, Tifar Auradiva. (2021). Kebijakan Pengendalian Sampah Plastik Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development*, 21(3), 1–1.
- Schoenefeld, Jonas J., & Jordan, Andrew J. (2019). Environmental policy evaluation in the EU: between learning, accountability, and political opportunities? *Environmental Politics*, 28(2), 365–384. <https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1549782>
- Syafi'i, Muhammad, Rahardian, Ramaditya, & Setijaningrum, Erna. (2020). *Waste Problem: An Analysis of Development Policy Instrument of the Regional Regulation Number 8 of 2013 in Sampang Regency*. 154(8), 2013–2015. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201116.023>
- Valle-Cruz, David, Criado, J. Ignacio, Sandoval-Almazán, Rodrigo, & Ruvalcaba-Gomez, Edgar A. (2020). Assessing the public policy-cycle framework in the age of artificial intelligence: From agenda-setting to policy evaluation. *Government Information Quarterly*, 37(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101509>
- Yang, Zhenjie, Huang, Canpeng, Liao, Fengjie, Lam, Fat Iam, Li, Lue, Qin, Quande, & Fan, Bi. (2023). Exploring the Characteristics of Solid Waste Management Policy in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area. *Sustainability (Switzerland)*, 15(10). <https://doi.org/10.3390/su15108160>
- Yin, Zeyu, Feng, Lili, Xin, Wenjing, & Yu, Sixian. (2023). *Status Quo Analysis and Optimization of the Classification Policy for Municipal Waste in Nanjing*. <https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2022.2327178>

Copyright holder:

Afifah Hadiyatullah, Bambang Bambang Kusbandrijo, Joko Widodo (2025)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

